

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

Kabupaten Kaur 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KAUR**

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

Kabupaten Kaur 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KAUR**

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) KABUPATEN KAUR 2020

Nomor Publikasi : 17040.1721
Katalog BPS : 4102002.1704
Ukuran Buku : 25,7 cm x 18,2 cm
Jumlah Halaman : viii + 39 halaman

Naskah :

Fungsi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Kaur

Gambar kulit :

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Kaur

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

TIM PENYUSUN
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
KABUPATEN KAUR TAHUN 2020

Penanggung Jawab:

In Inayati, S.ST, M.M.

Penulis Naskah:

Ropika Yuta, SST

Editor:

Ferdinand David Aritonang, SST

Perwajahan Kulit:

Kade Pasca Dwijayate, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada tahun 2021 ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur dapat menerbitkan publikasi **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur 2020**.

IKK Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan atau jawaban dalam salah satu variabel kebutuhan fiskal yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari survei serentak perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi tahun 2019 dengan sumber data dari para pedagang besar/distributor, pedagang eceran, kontraktor, Dinas Pekerjaan Umum serta instansi terkait lainnya.

Kepada semua pihak yang telah ikut membantu terwujudnya penghitungan IKK sampai terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Akhirnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para pengguna data.

Kaur, November 2021
Kepala BPS Kabupaten Kaur,

Iin Inayati, S.ST, M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data	5
2.2. Kegiatan Pengumpulan Data	6
2.3. Kuesioner yang Digunakan	7
2.4. Pemilihan Kualitas	7
2.5. Konsep dan Definisi.....	7
2.6. Metode Pengolahan Data	10
2.7. Metode Pengitungan IKK	10
2.8. Metode Analisis	16
BAB III PEMBAHASAN	18
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Kaur	18
3.2. Gambaran Kependudukan	21
3.3. Gambaran Transportasi dan Infrastruktur Jalan	21
3.4. Diagram Timbang Umum IKK	23
3.5. IKK Kabupaten Kaur Tahun 2020	28
BAB IV KESIMPULAN	34
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kaur Tahun 2020	20
Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kaur Tahun 2017-2020 (dalam Juta Rupiah).....	27
Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2014-2020	30
Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Lokasi Kabupaten Kaur	19
Gambar 2. Persentase Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Kaur Tahun 2020	22
Gambar 3. Persentase Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Kaur Tahun 2020	23
Gambar 4. Proporsi Alokasi Belanja Realisasi APBD Kabupaten Kaur Tahun 2020	24
Gambar 5. Proporsi Alokasi Belanja Langsung Realisasi APBD Kabupaten Kaur Tahun 2020	25
Gambar 6. Proporsi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kabupaten Kaur Tahun 2020	26
Gambar 7. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020	29

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur, 2020.....	36
Tabel 2. Panjang Jalan Menurut Pembiayaan, Jenis Permukaan dan Kondisi di Kabupaten Kaur, 2017-2020 (km)	37
Tabel 3. Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Kaur (Juta Rupiah), 2017-2020	37
Tabel 4. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Kaur (Juta Rupiah), 2017-2020	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai pembangunan fisik maupun non fisik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan lain dari pembangunan tersebut diharapkan juga dapat mengurangi kemiskinan. Pembangunan fisik yang tersebar merata diharapkan dapat membawa perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata, sehingga mengurangi kesenjangan sosial baik antar daerah maupun antar masyarakat.

Pembangunan fisik berupa gedung-gedung perkantoran, tempat ibadah, maupun tempat untuk kegiatan sosial masyarakat di berbagai bidang terus mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan visi misi setiap pemerintahan. Dalam rangka mendukung semua keberhasilan pembangunan tersebut, pemerintah menempuh kebijakan otonomi daerah yang bertujuan agar pembangunan dapat merata dan adil di seluruh wilayah. Disamping itu, melalui kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat juga mengatasi masalah ketimpangan horizontal antar daerah dengan tujuan utama yaitu pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengisyaratkan bahwasanya sebagian besar urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tersebut, maka kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi sangat strategis, dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dengan besarnya kewenangan tersebut maka pemerintah daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa: Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kewenangan pembangunan yang besar oleh pemerintah daerah ini disebut desentralisasi pembiayaan. Kewenangan ini diatur melalui UU No. 25 tahun 1999 mengenai pengaturan keuangan pusat dan daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 sampai sekarang ini, salah satu sumber pendapatan utama daerah kabupaten/kota adalah DAU. Selama beberapa tahun terakhir pun, DAU juga merupakan salah satu sumber pendapatan utama Pemerintah Kabupaten Kaur dan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Agar pembagian DAU ke daerah kabupaten/kota menjadi adil, proporsional, dan merata maka perlu adanya dukungan data yang valid, akurat dan terkini sebagai data dasar dalam penghitungan DAU yang didasarkan pada azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, kebutuhan fiskal yang dianggarkan melalui DAU dihitung berdasarkan lima variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Sehubungan dengan tugas dan fungsi BPS yang diatur dalam UU Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, maka dalam hal ini BPS merupakan penyedia data untuk empat komponen diantara lima komponen kapasitas fiskal penghitungan DAU. Data yang disediakan BPS untuk penghitungan DAU adalah jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tingkat kabupaten/kota dan propinsi seluruh Indonesia. DAU dihitung berdasarkan kesenjangan fiskal antar daerah, dimana kesenjangan fiskal merupakan selisih antara potensi dan kebutuhan daerah. Indikator-indikator pokok yang kebutuhan daerah dalam penghitungan DAU adalah Indeks Jumlah Penduduk (IP), Indeks Luas Wilayah (IW), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks PDRB perkapita (IPP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu indikator penting yang menunjukkan kebutuhan daerah dalam penghitungan DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Pentingnya IKK ini ditunjukkan oleh bobot penghitungannya dalam penghitungan DAU yang sangat besar. Dalam penghitungan tingkat kebutuhan fiskal daerah pada alokasi DAU 2020,

IKK memiliki peran yang sama dengan jumlah penduduk, memiliki bobot tiga kali lipat dari IPM dan dua kali lipat dari bobot IPP dan IW.

$$DAU_{i, 2020} = \text{Belanja Rata-rata Realisasi APBD}_{2019} (0,3 IP_{2019} + 0,15 IW_{2019} + 0,3 IKK_{2019} + 0,15 IPP_{2019} + 0,1 IPM_{2019})$$

Dari kelima variabel pada penghitungan DAU di atas terlihat bahwa jumlah penduduk dan indeks kemahalan harga barang/jasa konstruksi memiliki bobot atau peran paling besar dalam menentukan tingkat kebutuhan fiskal suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa selain data jumlah penduduk maka data lain yang tak kalah penting yang harus dimiliki oleh suatu daerah adalah data harga barang-barang konstruksi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, Kabupaten Kaur sangat membutuhkan data harga barang-barang konstruksi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam penghitungan IKK yang berimplikasi pada besaran DAU untuk tahun-tahun mendatang.

Dari keempat data yang dibutuhkan dalam penghitungan DAU, angka IKK dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Oleh karena, itu diperlukan adanya pengumpulan data dari lapangan untuk melengkapi dan memperbaharui data sebelumnya. Dalam hal ini peranan BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota sangat besar khususnya dalam proses pengumpulan data dari lapangan yang lengkap dan terkini.

Peranan BPS kabupaten/kota dalam hal ini BPS Kabupaten Kaur selain dalam pengumpulan data dari lapangan juga berperan untuk mensosialisasikan pentingnya data IKK kepada Pemerintah Kabupaten Kaur, sehingga data tersebut dapat memberi manfaat yang optimal bagi Pemerintah Kabupaten Kaur khususnya dalam penetapan nilai/biaya suatu bangunan konstruksi.

1.2. Tujuan

Dalam rangka optimalisasi manfaat IKK bagi Pemerintah Kabupaten Kaur, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis IKK Kabupaten Kaur untuk melihat secara utuh berbagai aspek tentang IKK seperti :

1. Memberikan gambaran komponen-komponen penyusun Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur Tahun 2020;
2. Mengetahui berapa nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur Tahun 2020;
3. Memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah dan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Kaur kedepannya dapat lebih terarah dan tepat sasaran;
4. Membuat perencanaan secara sistematis terhadap pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam Kabupaten Kaur di masa yang akan datang; dan
5. Membantu pengambil kebijakan, peneliti atau konsumen data lainnya dalam memahami keadaan masyarakat Kabupaten Kaur secara lebih spesifik khususnya harga barang-barang konstruksi.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota 2020 disusun berdasarkan jumlah kab/kota definitif yaitu 514 Kabupaten Kota, sedangkan IKK Provinsi dihitung di 34 Provinsi. Untuk penghitungan IKK Provinsi menggunakan data harga rata-rata dari seluruh kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Data dasar yang digunakan dalam penghitungan IKK kabupaten/kota adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi yang diperoleh melalui survei yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Harga bahan bangunan/konstruksi yang dikumpulkan meliputi barang-barang hasil pertambangan/penggalian (material natural) dan barang-barang hasil industri pengolahan (material pabrikan).

Sumber data utama dalam penghitungan angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) ini menggunakan data primer yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur, dan sebagai data pendukung adalah data sekunder dari Bagian Keuangan dan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kaur.

Data primer yang diambil di BPS didapat melalui survei yang dikenal dengan Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) Tahun 2020 dengan 47 komoditas dan 3 kelompok jenis bangunan, sedangkan data sekunder sebagai data bobot/timbangan IKK kabupaten/kota dan provinsi berasal dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur, yakni realisasi belanja daerah APBD Kaur tahun 2019 dan *Bill of Quantity* (BOQ) proyek yang telah selesai yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur.

2.2. Kegiatan Pengumpulan Data

Untuk keperluan penghitungan IKK 2020 dilakukan survei serentak khusus untuk barang-barang konstruksi dan sewa alat berat yang menjadi paket komoditas IKK. Survei Serentak Harga Bahan Bangunan/Konstruksi atau dikenal SHKK ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota (514 kabupaten/kota) di 34 provinsi di Indonesia. Informasi yang ditanyakan adalah harga bahan bangunan, sewa alat-alat berat dan upah jasa konstruksi seperti yang terdapat pada kuesioner survei. Survei serentak ini dilakukan empat kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. IKK tahun 2020 menggunakan data hasil survei periode pencacahan pada bulan Juli 2019, Oktober 2019, Januari 2020, dan April 2020. Penggunaan 4 periode tersebut dikarenakan pada periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

Responden survei terdiri dari beberapa kategori yaitu pedagang besar/distributor, pedagang campuran, produsen, pedagang eceran, dan kategori lainnya seperti : kontraktor, dinas PU atau instansi terkait lainnya (khusus untuk mengumpulkan data harga sewa alat-alat berat, dan upah pekerja).

Pemilihan responden diutamakan pedagang besar (PB), jika tidak ada PB maka dipilih responden dengan urutan skala prioritas yaitu dari pedagang campuran, produsen, dan pilihan terakhir yaitu pedagang eceran (PE). Pedagang campuran adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran, sedangkan data harga yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar. Jumlah sampel untuk setiap komoditas adalah 1-3 responden. Dari jumlah sampel ini diharapkan dapat melengkapi isian kuesioner.

Pencacahan dalam survei ini dilakukan dengan cara kunjungan dan wawancara langsung terhadap responden terpilih pada periode pencacahan. Jika tidak memungkinkan untuk wawancara langsung, maka kuesioner bisa ditinggal kepada responden untuk kemudian diambil kembali paling lambat keesokan harinya. Pada saat kuesioner diambil seyogyanya isian pada daftar tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan daftar isian telah terisi dengan baik dan benar.

2.3. Kuesioner yang Digunakan

Untuk mengumpulkan data harga bahan bangunan dan sewa alat berat paket komoditas IKK digunakan satu kuesioner/daftar yaitu daftar VHKK2020. Daftar ini digunakan untuk mencatat harga 47 paket komoditas bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi.

2.4. Pemilihan Kualitas

Agar hasil pengumpulan data harga dalam survei ini sesuai dengan kebutuhan data harga seperti yang tertuang dalam daftar VHKK2019 dan VHKK2020, maka perlu dilakukan pemilihan kualitas sebagai berikut:

1. Kualitas terpilih harus kualitas yang telah ditentukan oleh BPS Pusat, yaitu kualitas umum yang biasanya ada di seluruh kabupaten/kota dan tertulis dalam pilihan daftar VHKK2020 sebagai pertanyaan tertutup. Contoh :
 - a. Jenis barang : semen PCC
 - b. Kualitas : Tiga Roda 50 kg, Tiga Roda 40 kg
2. Apabila kualitas jenis barang atau bahan bangunan/konstruksi tidak tersedia dalam pilihan dalam kuesioner VHKK2020, maka pilih kualitas yang setara dan dominan digunakan di kabupaten/kota bersangkutan dengan menggunakan satuan standar yang tertulis dalam daftar VHKK2020 dalam isian yang terbuka. Contoh, apabila di daerah pencacahan tidak terdapat data harga cat besi/kayu isi 1 kg dengan kualitas/merk Avian, maka pilih kualitas yang setara dengan cat kayu Avian tersebut dengan mengisi isian yang kosong/terbuka yang tersedia. Ukuran kesetaraan ini dapat dilihat dari kualitas/mutu maupun harganya.

2.5. Konsep dan Definisi

Kualitas hasil pengumpulan data dalam survei ini sangat ditentukan oleh kualitas pemahaman petugas pengumpul data (pencacah) tentang konsep dan definisi

dari beberapa istilah yang digunakan dalam pelaksanaan survei ini. Istilah-istilah dan konsep yang perlu dipahami tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Harga perdagangan besar (HPB)** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara *party/grosir* di pasar pertama atas suatu barang.
2. **Harga produsen** adalah harga transaksi yang terjadi antara produsen sebagai penjual dengan pedagang besar/distributor sebagai pembeli secara *party/grosir* di pasar pertama atas suatu barang.
3. **Harga eceran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang eceran sebagai penjual dengan konsumen sebagai pembeli secara eceran/satuan yang digunakan untuk konsumsi langsung bukan untuk diperjualbelikan.
4. **Harga pedagang campuran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang yang menjual barang secara partai/grosir dan juga menjual barang secara eceran dengan konsumen baik yang digunakan untuk konsumsi langsung atau konsumsi tidak langsung.
5. **HPB bahan bangunan/konstruksi** adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.
6. **Produsen** adalah penghasil barang-barang baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan mesin.
7. **Pedagang Besar (PB)** adalah pedagang/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara *party/grosir* atau dalam jumlah besar.
8. **Pedagang campuran** adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran, sedangkan data harga yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar.
9. **Pedagang Besar Pertama (PB I)** adalah pedagang besar sesudah produsen/penghasil.
10. **Party/grosir atau jumlah besar** yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai

dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.

11. **Kegiatan Konstruksi** adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan pembangunan baru. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, sedangkan kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan.
12. **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, dan bulanan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah unit/jam.
13. **Excavator** adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah dan menuangkannya ke dalam kendaraan truk.
14. **Buldozer** adalah alat berat yang berfungsi untuk menggusur/memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak pendek.
15. **Skid Steer Loader** adalah suatu loader dengan *frame body* kecil yang kaku dan kuat, mesin yang bertenaga dengan *lift arm* (tangan angkat) yang digunakan untuk memasang *tools* (peralatan) dan tambahan lainnya.
16. **Three Wheel Roller (Mesin Giling)** adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah atau mengeraskan permukaan jalan.
17. **Dumptruck** adalah kendaraan angkut jarak jauh mempunyai bak angkut yang diungkit secara hidrolis untuk menurunkan muatannya.
18. **Mandor** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan berkoordinasi dengan kepala tukang. Pada pekerjaan yang lebih kecil, Mandor merangkap kepala tukang.

19. **Kepala Tukang** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan.
20. **Tukang batu** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas untuk memasang batu kali, batu bata, ubin, dan membuat plester tembok. Alat kerja yang digunakan biasanya adalah cetok, mal, dan *water pass*.
21. **Tukang kayu** adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membuat struktur bangunan dari kayu dan alat kerja yang digunakan biasanya adalah serut, gergaji, bor, pahat, dll.
22. **Tukang cat** adalah buruh konstruksi yang bekerja untuk mengecat tembok, papan, dan dinding lainnya.
23. **Tukang listrik** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas memasang instalasi listrik dan perlengkapannya dan memasang sistem listrik generator, trafo, dll.
24. **Pembantu Tukang** adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas membantu semua pekerjaan konstruksi.

2.6. Metode Pengolahan Data

Setelah tahap pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer atau software yang meliputi tahapan :

- a. Pemeriksaan data
- b. *Editing coding* (penyuntingan data dan pengkodean)
- c. *Entry data* (perekaman data)
- d. Validasi dan tabulasi data

2.7. Metode Penghitungan IKK

Sebelum metode penghitungan IKK dijelaskan, perlu pula dipahami mengenai konsep dan definisi. Beberapa konsep dan definisi yang perlu dipahami adalah mengenai kegiatan konstruksi dan klasifikasi jenis bangunan.

Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pembangunan baru, perluasan, renovasi/pemugaran, pemeliharaan/perbaikan, pembongkaran, penyiapan lahan (tidak termasuk pembelian lahan/tanah). Kegiatan konstruksi ini dibedakan/kelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis bangunan/konstruksi, yaitu:

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
2. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian;
3. Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan;
4. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi;
5. Bangunan lainnya

Kemudian konsep dan definisi dari kelima jenis bangunan tersebut adalah :

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal
 - a. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi : rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
 - b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi : konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - a. Bangunan pengairan, meliputi : pembangunan waduk (*reservoir*), bendungan (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi : bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
3. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
 - a. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi : pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta, pembangunan jalan dan jembatan kereta.

- c. Bangunan dermaga, meliputi : pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
4. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
 - a. Bangunan elektrikal, meliputi : pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi : bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 - e. Instalasi air, meliputi : instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
 - f. Instalasi listrik, meliputi : pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
 - g. Instalasi gas, meliputi : pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
 - h. Instalasi listrik jalan, meliputi : instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
 - i. Instalasi jaringan pipa, meliputi : jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
5. Bangunan lainnya, meliputi : bangunan sipil, pembangunan lapangan olah raga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman.

Selanjutnya dalam penghitungan IKK Kabupaten/Kota atau Provinsi dibutuhkan beberapa data penunjang, yaitu: paket komoditas, diagram timbang, dan harga bahan-bahan bangunan yang dominan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK.

2.7.1. Paket Komoditas

Yang dimaksud dengan paket komoditas IKK adalah suatu keranjang atau paket yang mencakup sejumlah bahan bangunan/konstruksi yang cukup dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi. Untuk penghitungan IKK tahun 2020 diperkirakan jumlah bahan bangunan dan sewa alat-alat berat yang menjadi paket komoditas berjumlah 47 komoditas bahan bangunan, seperti: pasir pasang, batu kali, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, lantai keramik, besi beton, seng plat, seng gelombang dan sewa alat berat, yaitu: *excavator*, *bulldozer*, *loader*, *tandem/Vibrating roller* (mesin gilas), *dumptruck*, *motor grader*, *asphalt finisher*, *generator set (Genset)*, serta upah.

Azaz pemilihan paket komoditas adalah :

1. *Comparability* (keterbandingan)
2. *Representativeness* (mewakili)
3. *Trade off comparability vs representativeness*

Selanjutnya tahapan dalam pemilihan paket komoditas IKK adalah :

- Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan maka cari kualitas yang setara.
- Spesifikasi/kualitas barang setiap periode pencacahan harus sama.
- Jenis barang yang dicatat harganya merupakan barang *ready stock*, harus benar-benar diperdagangkan di kabupaten/kota itu sendiri kecuali untuk barang-barang natural. Pencacahan barang natural (pasir, batu pondasi, batu split, batu bata, batako, dan kusen) tidak harus *ready stock*.

2.7.2. Diagram Timbang

Diagram Timbang yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/upah jasa yang dibutuhkan untuk membangun satu unit jenis bangunan per satuan ukuran luas. Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada di atas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan overhead cost dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai. IKK tahun 2020 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2019.

Diagram timbang umum IKK adalah bobot atau andil masing-masing kelompok jenis bangunan yang akan digunakan untuk menghitung IKK umum. Diagram timbang umum IKK ini disusun berdasarkan data realisasi APBD dan pengeluaran belanja pembangunan dan rutin. Data realisasi APBD ini dapat diperoleh dari Pemerintah Kab/Kota. Dengan digunakannya realisasi APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APD masing-masing kabupaten/kota.

Penghitungan diagram timbang menggunakan pendekatan *Basket of Constructions Component (BOCC)*. Tujuan penggunaan pendekatan tersebut adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dengan biaya yang murah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum di suatu wilayah.

2.7.3. Formula Penghitungan

Penghitungan IKK 2020 dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten.

$$NK_j = \sum_{i=1}^n p_i \cdot q_i$$

NK_j = Nilai Komponen ke-j

p_i = Harga Material/upah/sewa alat ke- i

q_i = Kuantitas/volume material/upah/sewa alat ke- i

n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

- b. Tahap kedua, penghitungan PPP sistem dengan menggunakan regresi *Country Product Dummy* (CPD), model regresi CPD.

$$\ln NK_j = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

NK_j = Nilai Komponen ke-j

C_i = Dummy kabupaten/kota ke- i

P_i = Dummy komponen ke-j dalam suatu system dan bangunan

α_i dan β_j = Koefisien regresi

PPP (Purchasing Power Parity)_{sistem i} = $\exp(\alpha_i)$

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalkan pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

C_i = Dummy kota acuan = 0

- c. Tahap ketiga, penghitungan PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) .

$$PPP_{\text{bangunan}} = \prod_{i=1}^n (PPP_{(\text{sistem}_i)} \times 100)^{w_{2i}}$$

n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan

- d. Tahap keempat, penghitungan PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometric.

$$PPP_{\text{proyek}} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{(\text{bangunan}_i)}) \right)^{\frac{1}{n}}$$

n = Jumlah sistem dalam suatu proyek

- e. Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometric tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut :

$$IKK_{\text{kab / kota}} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{\text{proyek}_i})^{w_{1i}} \right) \times 100$$

n = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

2.8. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk menelaah informasi melalui data pada tabel-tabel dan grafik secara sederhana sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan dari objek penelitian. Dalam publikasi ini, analisis tersebut digunakan untuk menginterpretasikan angka IKK

Kabupaten Kaur, jika dibandingkan dengan angka IKK Kab/Kota lain di Provinsi Bengkulu dan angka nasional (standar).

Beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam analisis IKK tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. IKK 2014-2020 disajikan dengan menentukan salah satu ibukota propinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan. IKK tahun 2020 ini menggunakan Kota Semarang sebagai kota Acuan.
2. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK nya, literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten ini dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003. Ibukota kabupaten ini adalah Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan dengan jarak tempuh 250 km dari Kota Bengkulu atau merupakan kabupaten terjauh kedua setelah Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu..

Secara astronomis Kabupaten Kaur terletak pada posisi $4^{\circ} 15' 8,21''$ – $4^{\circ} 55' 27,77''$ Lintang Selatan (LS) dan $103^{\circ} 4' 8,76''$ – $103^{\circ} 46' 50,12''$ Bujur Timur (BT). Kondisi astronomis ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Kaur beriklim tropis atau Iklim A karena terletak antara 0° – $23\frac{1}{2}^{\circ}$ LS. Musim yang terjadi di Kabupaten Kaur sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim hujan (Desember-Maret) dan musim kemarau (Juni-September) sementara pada bulan April-Mei dan Oktober-November merupakan masa peralihan/pancaroba.

Secara geografis Kabupaten Kaur terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan, termasuk dalam wilayah administrasi paling selatan Provinsi Bengkulu, Indonesia. Berjarak sekitar 250 km dari ibukota Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Lampung ke arah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, secara administrasi Kabupaten Kaur berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah selatan : Kabupaten Pesisir Barat (pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat), Provinsi Lampung;
- Sebelah barat : Samudera Hindia; dan

- Sebelah timur : Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1.

Peta Lokasi Kabupaten Kaur



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Undang-undang tersebut dan surat Mendagri No. 136/205/PUM tanggal 12 September 2005, luas wilayah daratan Kabupaten Kaur mencapai 2.365 km² atau 236.500 Ha, panjang garis pantai 89,17 km dan luas kawasan laut sejauh 4 mil dari garis pantai seluas 660,59 km².

Topografi wilayah Kabupaten Kaur terbagi menjadi 3 (tiga) jalur yaitu :

1. Jalur *Low Land* (dataran rendah) dengan ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut. Wilayah yang termasuk dalam Jalur *Low Land* mencapai 9% atau 20.889 hektar. Kecamatan yang termasuk ke dalam Jalur *Low Land* adalah Kecamatan Tanjung Kemuning, Semidang Gumay, Kaur Utara, Tetap, Kaur Selatan, Maje dan Nasal.
2. Jalur Bukit *Range* dengan ketinggian 100 – 1.000 m. Wilayah yang termasuk dalam Jalur Bukit *Range* mencapai 61% atau 144.026 hektar. Semua

kecamatan di Kabupaten Kaur sebagian wilayahnya ada yang masuk katagori jalur ini.

3. Jalur Pegunungan dengan ketinggian > 1.000 m. Wilayah yang termasuk dalam Jalur Pegunungan mencapai 30% atau 71.585 hektar. Di Kabupaten Kaur, yang termasuk ke dalam jalur ini adalah kawasan Bukit Barisan.

Tabel 1.

Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kaur Tahun 2020

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nasal	Merpas	519,92
2.	Maje	Linau	361,04
3.	Kaur Selatan	Bintuhan	92,75
4.	Tetap	Tetap	87,92
5.	Kaur Tengah	Tanjung Iman	26,40
6.	Luas	Benua Ratu	124,88
7.	Muara Sahung	Ulak Lebar	256,00
8.	Kinal	Tanjung Baru	154,03
9.	Semidang Gumay	Mentiring	64,91
10.	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning	72,91
11.	Kelam Tengah	Rigangan I	35,84
12.	Kaur Utara	Simpang Tiga	49,80
13.	Padang Guci Hilir	Gunung Kaya	115,96
14.	Lungkang Kule	Sukananti	32,00
15.	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun	370,64
Kabupaten Kaur		Bintuhan	2.365,00

Sumber : BPS Kabupaten Kaur

Pada tahun 2003 di awal pembentukannya, Kabupaten Kaur memiliki tujuh kecamatan induk, yaitu Kecamatan Nasal, Maje, Kaur Selatan, Kinal, Kaur Tengah, Tanjung Kemuning dan Kaur Utara. Namun, hingga tahun 2020 jumlah kecamatan di Kabupaten Kaur sudah berjumlah lima belas kecamatan yang terdiri atas 192 desa dan 3 kelurahan.

3.2. Gambaran Kependudukan

Pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Kaur diperkirakan mencapai 126.551 jiwa yang terdiri dari 65.238 jiwa penduduk laki-laki dan 61.313 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin 106. Ini artinya, setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Kaur terdapat 106 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 2.365,00 km², kepadatan penduduknya mencapai 53 sampai 54 jiwa per km².

Sebaran penduduk menurut kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten Kaur tidak merata. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kelam Tengah dengan tingkat kepadatan 200 jiwa per km² dan Kecamatan Kaur Tengah dengan tingkat kepadatan 191 jiwa per km², sedangkan kecamatan paling jarang atau tingkat kepadatan penduduknya relatif sedikit adalah Kecamatan Padang Guci Hulu dengan kepadatan 21 jiwa per km².

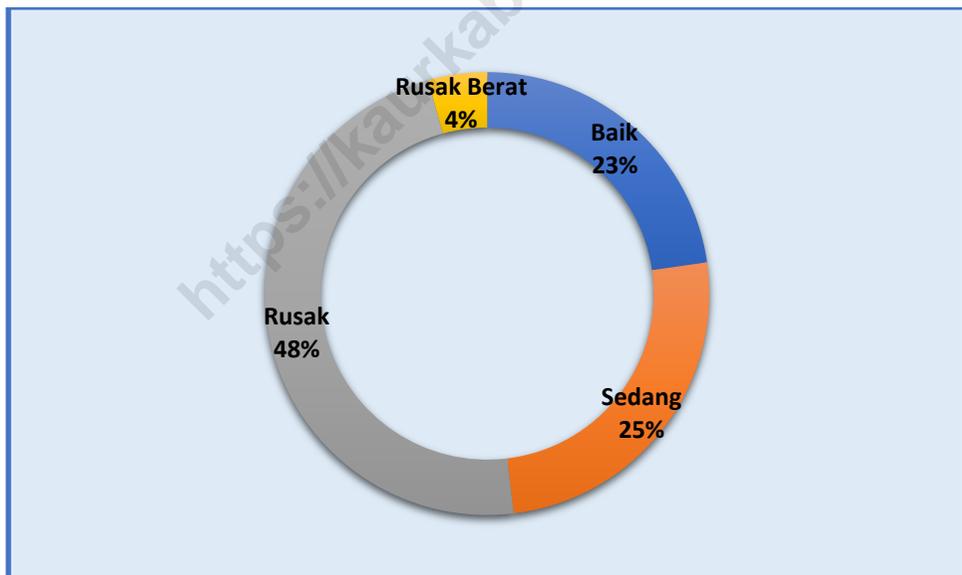
3.3. Gambaran Transportasi dan Infrastruktur Jalan

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dihitung dengan mengumpulkan sejumlah harga komoditas di bidang konstruksi. Salah satu hal yang berpengaruh dalam membentuk harga di suatu wilayah antara lain ketersediaan barang dan jasa serta kelancaran pola arus distribusi barang ke wilayah tersebut. Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa diperlukan sarana penunjang berupa sarana transportasi maupun infrastruktur jalan.

Media transportasi di Kabupaten Kaur masih mengandalkan transportasi darat dalam mendistribusikan barang dan jasanya. Alat transportasi roda empat belum mengalami perkembangan yang tinggi. Perkembangan jumlah transportasi darat yang terus mengalami perkembangan adalah kendaraan roda dua atau motor.

Pada tahun 2020, infrastruktur jalan darat yang menghubungkan antar wilayah di kabupaten ini terbentang sepanjang 784,09 km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 72,67 km, jalan provinsi sepanjang 120,30 km, dan jalan kabupaten sepanjang 578,54 km.

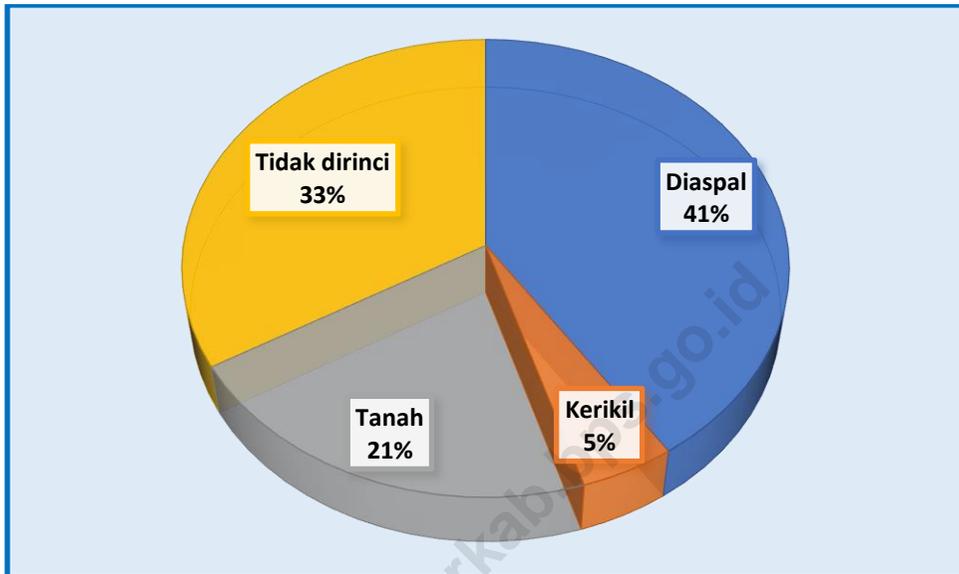
Gambar 2.
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Kaur Tahun 2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur

Persentase jalan menurut kondisi di Kabupaten Kaur tahun 2020, dari total 578,540 km panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Kaur, 131,593 km (22,7 persen) merupakan jalan baik, 146,651 km (25,3 persen) merupakan jalan sedang, 275,523 km (47,6 persen) merupakan jalan rusak, dan sepanjang 24,773 km (4,28 persen) dalam kondisi rusak berat.

Gambar 3.
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Kaur
Tahun 2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur

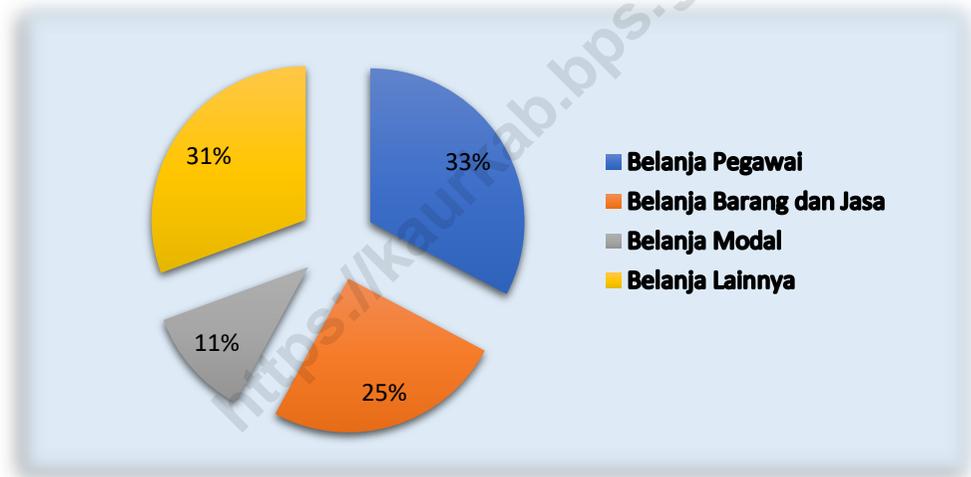
Berdasarkan gambar 3, panjang jalan kabupaten di Kabupaten Kaur tahun 2020 sepanjang 578.540 km, panjang jalan permukaan yang diaspal sepanjang 235,0 km (40,6 persen), jalan permukaan yang kerikil sepanjang 26,67 km (4,61 persen), jalan dengan kondisi permukaan tanah sepanjang 123,113 km (21,28 persen), dan tidak dirinci/lainnya sepanjang 193,753 km (33,49 persen).

3.4. Diagram Timbang Umum IKK

Kabupaten Kaur termasuk kabupaten yang tergolong baru di Indonesia. Sebagai kabupaten baru, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kaur adalah pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Kaur telah mengalokasikan sebagian anggaran pendapatannya guna merealisasikan pembangunan fisik baik berupa bangunan gedung, infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan pertanian, dan sebagainya.

Berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur tahun 2020, dari total belanja pemerintah daerah Kabupaten Kaur baik belanja langsung maupun tidak langsung, alokasi terbesar masih untuk belanja pegawai sebesar 33%, diikuti oleh belanja lainnya sebesar 31% yang meliputi belanja hibah, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik serta belanja tidak terduga, untuk belanja barang dan jasa sebesar 25% sementara belanja modal mendapat alokasi paling sedikit hanya 11%.

Gambar 4.
Proporsi Alokasi Belanja Realisasi APBD Kabupaten Kaur Tahun 2020

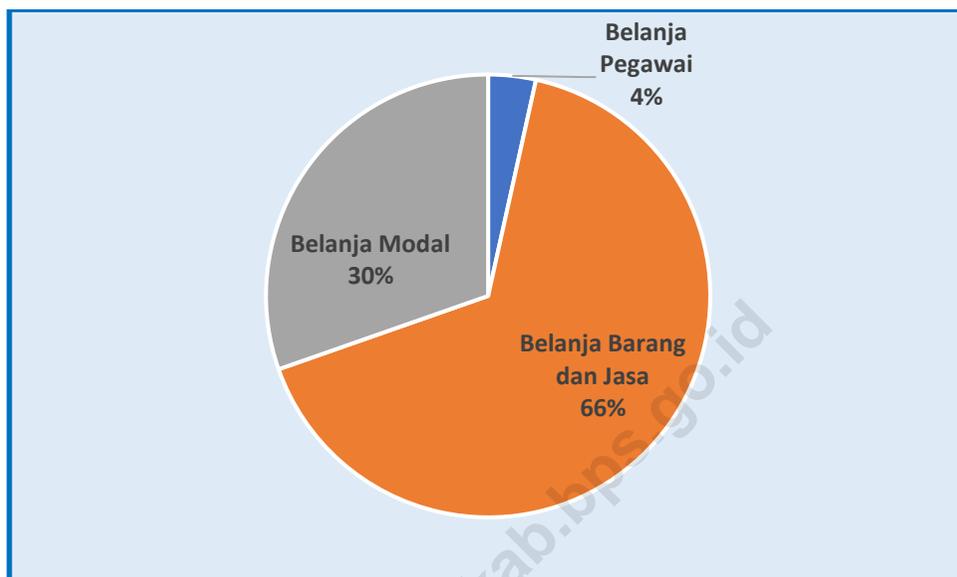


Sumber : BKD Kabupaten Kaur

Jika hanya dilihat dari belanja langsung, alokasi belanja pegawai sebesar 4 persen, 66 persen untuk belanja barang dan jasa dan 30 persen untuk belanja modal. Dibanding tahun 2019, proporsi belanja barang dan jasa lebih besar 3%, sebaliknya untuk belanja modal lebih kecil 3%. Hal ini terjadi akibat adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda di hampir seluruh belahan dunia, sehingga pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan wabah tersebut yang termasuk dalam kategori belanja barang dan jasa.

Gambar 5.

Proporsi Alokasi Belanja Langsung Realisasi APBD Kabupaten Kaur Tahun 2020

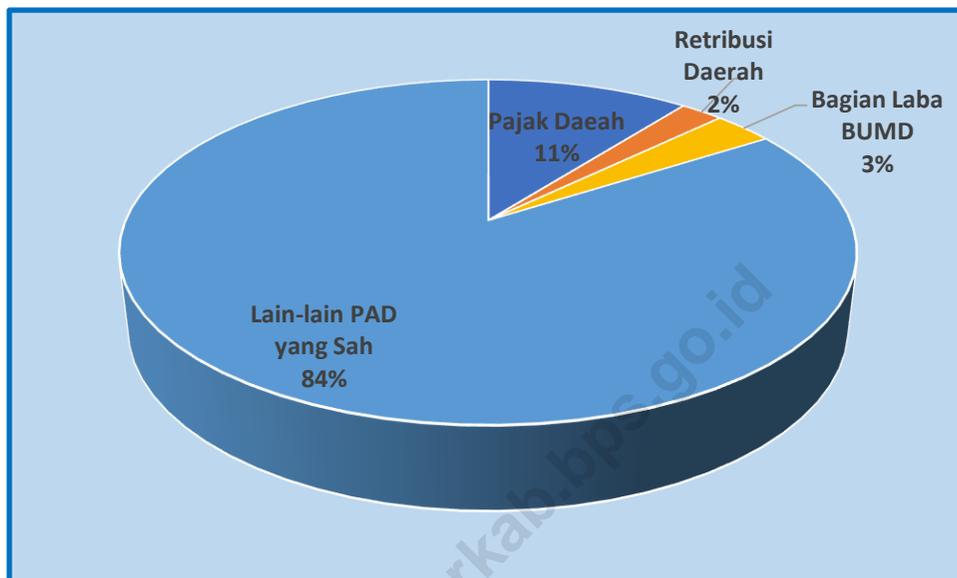


Sumber : BKD Kabupaten Kaur

Pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten Kaur sebesar 787.859,374 juta rupiah. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi pendapatan asli daerah mencapai 53.863,681 juta rupiah. Proporsi terbesar dari pendapatan tersebut adalah Lain-lain PAD yang sah sebesar 84 persen. Proporsi terbesar kedua adalah pajak daerah yang mencapai 11 persen, kemudian pendapatan dari bagian laba BUMD sebesar 3 persen dan pendapatan dari retribusi daerah sebesar 2 persen.

Gambar 6.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kabupaten Kaur Tahun 2020



Sumber : BKD Kabupaten Kaur

Kebutuhan akan keuangan daerah menjadi suatu syarat pembangunan fisik dapat berjalan lancar. Dengan kondisi Kabupaten Kaur yang merupakan kabupaten pemekaraan yang belum lama berdiri sudah selayaknya pemerintah daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri. Terdapat beberapa sumber sumber keuangan lain selain pendapatan asli daerah seperti dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri atas 5 komponen yaitu, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana tunjangan pendidikan. Sedangkan, komponen di dalam pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi, dan pendapatan lainnya.

Tabel 2.
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kaur 2017-2020 (dalam Juta Rupiah)

Jenis Pendapatan	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Daerah	762.388,89	750.536,79	819.236,23	787.859,37
1. Pendapatan Asli Daerah	34.261,51	38.688,34	32.402,28	53.863,68
2. Dana Perimbangan	564.143,95	551.555,37	619.239,55	582.122,71
1.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.374,97	12.537,27	13.861,50	43.926,05
1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	433.937,04	435.518,39	435.279,05	414.772,61
1.3. Dana Alokasi Khusus	116.831,93	103.499,7	152.099	123.424,05
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	163.983,43	160.293,08	167.594,30	151.872,98

Sumber : BKD Kabupaten Kaur

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan membangun wilayahnya, Kabupaten Kaur masih bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Total anggaran pendapatan Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar 787.859.37 juta rupiah. Sebagian besar anggaran tersebut merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan yakni sebesar 582.122,71 juta rupiah yang terdiri dari 43.926,05 juta rupiah sebagai bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak (7,54 persen). Sebanyak 414.772,61 juta rupiah merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang memiliki porsi sebesar 71,25 persen. Selain itu, terdapat dana alokasi khusus sebanyak 123.424,05 juta rupiah (21,2 persen). Sumber pendapatan lainnya adalah pendapatan daerah lainnya yang sah, yaitu sebanyak 151.872,98 juta rupiah. Sumber pendapatan tersebut merupakan realisasi APBD 2020 yang diperoleh dari BKD Kabupaten Kaur.

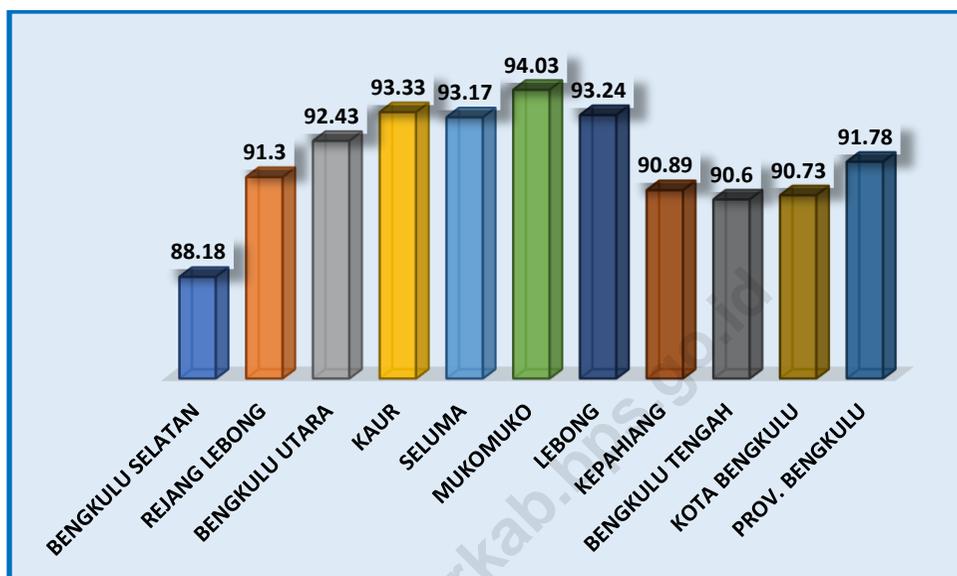
3.5. IKK Kabupaten Kaur Tahun 2020

IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. IKK adalah Indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK nya dan literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar. Dalam penghitungan IKK 2020, kota acuan yang digunakan masih sama dengan tahun 2018 dan 2019 yaitu Kota Semarang. Kota acuan sebelumnya adalah Kota Surabaya di tahun 2015 – 2017. Pertimbangan dalam memilih kota acuan didasarkan pada nilai indeks suatu kota yang mendekati indeks rata rata nasional serta kelengkapan datanya.

Penghitungan IKK dilakukan pada setiap kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia dengan menggunakan metode jenis barang dan jasa serta periode pencacahan yang sama sehingga hasilnya *comparable*. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi antar wilayah se-Indonesia dalam kurun waktu yang sama. IKK tahun 2020 telah dihitung untuk seluruh kabupaten/kota dan 34 Provinsi se-Indonesia, termasuk diantaranya adalah IKK Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Nilai IKK 2020 merupakan salah satu variabel dalam penentuan DAU tahun anggaran 2021.

Gambar 7.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar 93,33. Hal ini dapat diartikan bahwa harga barang dan jasa konstruksi di Kabupaten Kaur relatif lebih rendah dibandingkan Kota Semarang yang menjadi kota acuan perhitungan IKK 2020. Di antara sepuluh kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu, nilai IKK Kabupaten Kaur 2020 masih menduduki posisi terbesar kedua sama dengan tahun 2019 setelah Kabupaten Mukomuko (94,03). Nilai IKK terkecil di Provinsi Bengkulu juga masih diduduki oleh Kabupaten Bengkulu Selatan (88,18). Nilai IKK Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah sebesar 91,78. Secara keseluruhan, nilai IKK kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu masih relatif lebih rendah dibandingkan nilai IKK Kota Semarang.

Tabel 3.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2014-2020

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
BENGKULU SELATAN	97,98	96,86	93,54	89,64	93,03	91,79	88,18
REJANG LEBONG	94,64	94,59	99,26	94,04	94,99	95,03	91,30
BENGKULU UTARA	96,76	95,4	94,19	92,02	96,05	94,82	92,43
KAUR	103,32	94,35	93,1	90,54	96,91	97,46	93,33
SELUMA	102,14	93,35	94,4	92,61	97,10	95,44	93,17
MUKOMUKO	112,53	103,05	104,06	102,83	102,40	98,30	94,03
LEBONG	98,58	97,12	96,77	94,91	97,71	95,18	93,24
KEPAHIANG	103,55	93,56	91,06	90,14	95,64	93,65	90,89
BENGKULU TENGAH	102,43	95,1	95,77	91,43	95,79	93,32	90,60
KOTA BENGKULU	99,45	95,83	99,61	95,26	98,25	92,65	90,73
PROV. BENGKULU	96,21	101,64	101,86	93,27	96,76	94,74	91,78
NASIONAL	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik

Nilai IKK Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar 93,33. Jika dibandingkan tahun 2019, nilai IKK kabupaten Kaur turun 4,13 poin dari sebelumnya sebesar 97,46. Hal ini sejalan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu dimana semua kabupaten/kota mengalami penurunan angka IKK sehingga penurunan juga terjadi untuk nilai IKK Provinsi Bengkulu. Nilai IKK Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar 94,74 menurun 2,96 poin menjadi 91,78 di tahun 2020.

Sejak tahun 2014 hingga 2020, nilai IKK Kabupaten Kaur mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2014, nilai IKK Kaur mencapai 103,32 terbesar dibandingkan tahun 2015 hingga 2020. Sejak tahun 2015 hingga 2020, nilai IKK Kaur selalu berada di bawah 100. Hal ini mengindikasikan

bahwa sejak tahun 2015, harga barang-barang dan jasa konstruksi di Kaur relatif lebih rendah dibandingkan kota-kota acuan penghitungan IKK. Sepanjang tahun 2014 hingga 2020, nilai IKK terkecil di Kaur terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 90,54. Namun, pada tahun 2018, terdapat kenaikan yang cukup signifikan menjadi 96,91. Besaran kenaikan tersebut mencapai 6,37 poin dan kembali meningkat di tahun 2019. Sementara di Tahun 2020 nilai IKK Kaur mengalami penurunan Kembali.

Tabel 4.
Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020

No (1)	Kode (2)	Provinsi (3)	IKK (4)	Ranking (5)
1	1100	PROV. ACEH	96,38	24
2	1200	PROV. SUMATERA UTARA	99,84	18
3	1300	PROV. SUMATERA BARAT	92,96	28
4	1400	PROV. R I A U	95,72	25
5	1500	PROV. J A M B I	90,35	32
6	1600	PROV. SUMATERA SELATAN	92,69	29
7	1700	PROV. BENGKULU	91,78	30
8	1800	PROV. LAMPUNG	88,67	34
9	1900	PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	101,9	15
10	2100	PROV. KEPULAUAN RIAU	121,5	4
11	3100	PROV. DKI JAKARTA	116,84	6
12	3200	PROV. JAWA BARAT	103,93	12
13	3300	PROV. JAWA TENGAH	97,31	22
14	3400	PROV. DI YOGYAKARTA	102,29	14
15	3500	PROV. JAWA TIMUR	102,44	13
16	3600	PROV. B A N T E N	97,05	23
17	5100	PROV. B A L I	115,04	7

No (1)	Kode (2)	Provinsi (3)	IKK (4)	Ranking (5)
18	5200	PROV. NUSA TENGGARA BARAT	99,13	20
19	5300	PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	97,95	21
20	6100	PROV. KALIMANTAN BARAT	110,92	8
21	6200	PROV. KALIMANTAN TENGAH	99,55	19
22	6300	PROV. KALIMANTAN SELATAN	100,32	17
23	6400	PROV. KALIMANTAN TIMUR	109,69	10
24	6500	PROV. KALIMANTAN UTARA	109,9	9
25	7100	PROV. SULAWESI UTARA	104,11	11
26	7200	PROV. SULAWESI TENGAH	90,74	31
27	7300	PROV. SULAWESI SELATAN	95,11	26
28	7400	PROV. SULAWESI TENGGARA	101,09	16
29	7500	PROV. GORONTALO	94,12	27
30	7600	PROV. SULAWESI BARAT	89,48	33
31	8100	PROV. M A L U K U	124,38	3
32	8200	PROV. MALUKU UTARA	120,52	5
33	9100	PROV. PAPUA BARAT	129,66	2
34	9400	PROV. PAPUA	208,9	1

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 4 di atas menunjukkan perbandingan IKK antar provinsi di Indonesia. Provinsi Bengkulu memiliki IKK sebesar 91,78. Dibandingkan provinsi lain di Indonesia, nilai IKK Provinsi Bengkulu relative kecil. Jika diurutkan dari nilai IKK terbesar ke terkecil, Bengkulu menempati ranking 30 dari 34 Provinsi. Terdapat 4 provinsi lain yang memiliki nilai IKK lebih kecil dibandingkan provinsi Bengkulu. Jika dibandingkan dengan Provinsi yang berdekatan, nilai IKK yang relatif hampir sama dengan Provinsi Bengkulu adalah Provinsi Sumatera Selatan yang menduduki ranking 29 yakni 1 tingkat di atas/lebih tinggi (92,69). Selain itu, nilai IKK yang relatif sama juga namun lebih kecil dari Provinsi Bengkulu adalah

Provinsi Jambi (90,35) yang berada di reangking 32. Sementara untuk Provinsi Sumatera Barat ada di rangking ke 28 dengan nilai IKK 92,96 dan Provinsi Lampung menduduki rangking 34 atau nilai IKK terkecil yaitu 88,67. Posisi Provinsi Lampung ini masih sama dengan tahun 2019 yang memiliki nilai IKK terkecil.

Di sisi lain, nilai IKK 2020 tertinggi masih berada di Papua (208,9), kemudian terbesar kedua adalah Papua Barat (129,66). Nilai IKK yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia disebabkan arus distribusi barang yang masih sulit di daerah Papua. Jarak yang relatif jauh dari pusat-pusat barang-barang konstruksi menjadikan nilai IKK Papua dan Papua Barat menjadi cukup besar. Perlu adanya upaya-upaya pemerataan harga barang-barang dan jasa konstruksi di Papua dan provinsi lain yang masih tinggi dengan membangun kawasan sentra barang-barang konstruksi, sehingga dapat menurunkan biaya angkut untuk barang-barang konstruksi tersebut. Ada 17 provinsi yang memiliki nilai IKK di atas 100 atau dengan kata lain setengah dari jumlah provinsi yang ada memiliki nilai IKK di atas 100 sedangkan setengah lainnya berada di bawah 100 yang artinya terbagi menjadi 2 kelompok wilayah biaya konstruksinya lebih mahal dan lebih murah dari Kota Acuan.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 33 tahun 2004.
2. IKK merupakan *spatial index*, yang digunakan untuk membandingkan antarwilayah, namun bukan perbandingan antarwaktu. Setelah dilakukan penghitungan, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur Tahun 2020 yaitu sebesar 93,33, relatif lebih rendah dibandingkan kota Semarang sebagai kota acuan IKK 2020.
3. IKK Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 adalah 91,78. Jika diurutkan dari terbesar menjadi terkecil, nilai IKK Provinsi Bengkulu berada di urutan 30, IKK terbesar di Indonesia adalah Provinsi Papua (208,9), sedangkan nilai IKK terkecil adalah Provinsi Lampung (88,67).
4. Masih cukup besarnya nilai IKK beberapa provinsi terhadap kota acuan IKK mengindikasikan bahwa belum meratanya harga-harga barang dan jasa konstruksi di Indonesia. Perlu dilakukan upaya dan kolaborasi antara pihak swasta dan pemerintah untuk meminimalkan bahkan menyamakan harga barang-barang konstruksi untuk memperoleh kesejahteraan yang sama.

<https://kbrkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur, 2020

Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)
	(km ²)	(%)	Jumlah (ribu)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nasal	519,92	21,99	16,6	13,15	32
Maje	361,04	15,27	14,2	11,21	39
Kaur Selatan	92,75	3,92	16,8	13,24	181
Tetap	87,92	3,70	6,9	5,46	79
Kaur Tengah	26,40	1,12	5,1	3,99	191
Luas	124,88	5,28	5,6	4,45	45
Muara Sahung	256,00	10,83	6,7	5,29	26
Kinal	154,03	6,51	4,8	3,83	31
Semidang Gumay	64,91	2,75	6,5	5,16	101
Tanjung Kemuning	72,91	3,08	13,4	10,61	184
Kelam Tengah	35,84	1,52	7,2	5,68	200
Kaur Utara	49,80	2,11	7,6	6,02	153
Padang Guci Hilir	115,96	4,90	3,8	3,04	33
Lungkang Kule	32,00	1,35	3,5	2,75	109
Padang Guci Hulu	370,64	15,68	7,8	6,13	21
Jumlah	2.364,48	100,00	126,5	100,00	54

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Tabel 2. Panjang Jalan Menurut Pembiayaan, Jenis Permukaan, dan Kondisi di Kabupaten Kaur, 2017-2020 (km)

Jenis Jalan	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pembiayaan	771,51	771,51	771,51	771,51
a. Jalan Negara	72,67	72,67	72,67	72,67
b. Jalan Provinsi	120,30	120,30	120,30	120,30
c. Jalan Kabupaten	578,540	578,540	578,540	578,540
2. Jenis Permukaan	578,540	578,540	578,540	578,540
a. Aspal	241,230	273,45	273,96	235,003
b. Kerikil	159,480	191,81	192,50	26,671
c. Tanah	177,830	79,39	77,75	123,113
d. Lainnya	0,00	33,89	34,33	193,753
3. Kondisi	578,540	578,540	578,540	578,540
a. Baik	220,960	137,039	137,045	131,593
b. Sedang	97,520	77,149	77,154	146,651
c. Rusak	108,940	173,678	173,675	275,523
d. Rusak Berat	151,120	190,672	190,666	24,773

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Kaur (Juta Rupiah), 2017-2020

Jenis Penerimaan	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)
1. Pendapatan Asli Daerah	34.261,51	38.688,34	32.402,38	53.863,68
a. Pajak Daerah	6.246,47	9.392,81	9.820,06	5.697,98
b. Retribusi Daerah	1.684,41	1.487,22	1.262,20	1.207,35
c. Bagian Laba BUMD	2.762,71	2.416,19	1.556,51	1.695,37
d. Penerimaan Lain-lain	23.567,91	25.392,12	19.763,61	45.262,98
2. Dana Perimbangan	564.143,95	551.555,37	619.239,55	582.122,71
a. Bagi Hasil Pajak	8.827,15	6.257,94	6.036,95	38.956,75
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	4.547,82	6.279,33	7.824,55	4.969,30
c. Dana Alokasi Umum	433.937,04	435.518,39	453.279,05	414.772,61
d. Dana Alokasi Khusus	116.831,93	103.499,70	152.099	123.424,05
3. Pendapatan Daerah yang Sah	163.983,43	160.293,08	167.594,30	151.872,98
a. Pendapatan hibah	0,00	0,00	6.322,43	1.580,00
b. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak				
Provinsi	18.684,95	21.075,66	15.133,97	14.536,26
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	9.250	0,00	20.830,78
e. Bantuan Keu. dari Prov	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Pendapatan Lainnya	145.298,48	129.967,42	146.137,89	114.925,94
Jumlah	762.388,89	750.536,79	819.236,23	787.859,37

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur

Tabel 4. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Kaur (Juta Rupiah), 2017-2020

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)
1. Belanja Tidak Langsung	422.792,41	407.824,13	456.779,09	512.052,78
a. Belanja Pegawai	247.588,23	248.811,42	257.536,52	259.478,25
b. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Belanja Hibah	2.697,2	2.055,2	5.302,14	39.686,56
e. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
f. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Belanja Bantuan Keu. kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	172.506,97	156.238,79	193.940,43	192.174,98
h. Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	20.712,99
2. Belanja Langsung	360.740,08	330.132,54	357.639,13	313.249,50
a. Belanja Pegawai	12.570,19	16.299,49	13.036,09	10.849,33
b. Belanja Barang dan Jasa	187.112,97	222.765,33	225.986,92	207.249,04
c. Belanja Modal	161.056,92	91.067,71	118.616,12	95.151,13
Jumlah	886.889,24	737.956,67	814.418,22	825.302,28

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://kaurkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KAUR**

Jl. Peltu M. Ilyas T. Panji Alam, Kompleks Perkantoran Pemkab Kaur,
Padang Kempas, Bintuhan Telp. (0736) 6180009, Fax. (0739) 6180002
Homepage : <https://kaurkab.bps.go.id>, Email : bps1704@bps.go.id

ISBN 978-623-95139-3-1



9 786239 513931